

TESIS

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGOLONGAN UMKM:

ANALISIS ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7

TAHUN 2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP)

NO. 55 TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF

HUKUM PAJAK DAN HUKUM BISNIS



DWI HANTORO PRAKOSO

NIM: 12124059

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2025

TESIS

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGOLONGAN UMKM:

ANALISIS ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7

TAHUN 2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP)

NO. 55 TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF

HUKUM PAJAK DAN HUKUM BISNIS

Diajukan Untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi

Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh:

DWI HANTORO PRAKOSO

NIM: 12124059

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2025

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGOLONGAN UMKM:
ANALISIS ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7
TAHUN 2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP)
NO. 55 TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PAJAK DAN HUKUM BISNIS**



**Disusun Oleh :
DWI HANTORO PRAKOSO
NIM : 12124059**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2025**

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGOLONGAN UMKM:
ANALISIS ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7
TAHUN 2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP)
NO. 55 TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PAJAK DAN HUKUM BISNIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Program Studi
Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**

PRO PATRIA

Disusun Oleh :

DWI HANTORO PRAKOSO

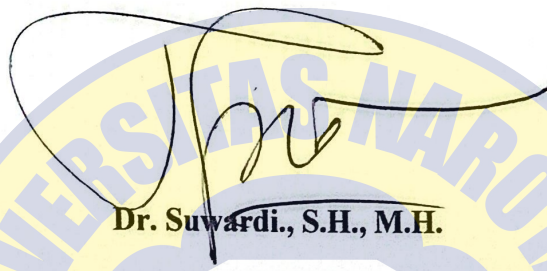
NIM : 12124059

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 23 Juli 2025**

Oleh Dosen Pembimbing :

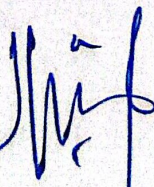


Dr. Suwardi., S.H., M.H.



Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



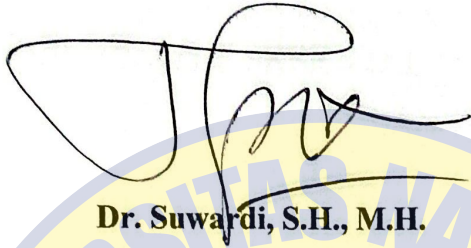
Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 28 Juli 2025

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Suwardi, S.H., M.H.



**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

TESIS

PADA TANGGAL :

TIM PENGUJI TESIS

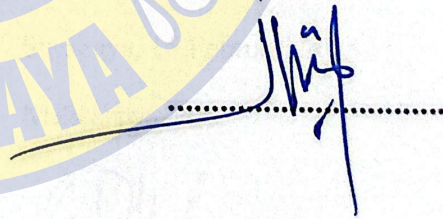
Ketua :
Dr. NYNDA FATMAWATI O, S.H., M



Anggota :
Dr. SUWARDI S.H., M.Hum.



Anggota :
Dr. MIFTAKHUL HUDA, SH, MH





UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS*

Nama Mahasiswa : DWI HANTORO PRAKOSO

No. Induk Mahasiswa : 12124059

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum / 2024

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGOLONGAN UMKM : ANALISIS ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 55 TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK DAN HUKUM BISNIS

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:

Dr. Suwardi, S.H., M.H.

Menyetujui,

Ketua Program Studi


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

Surabaya, 15 Februari 2025

Mahasiswa


Dwi Hantoro Prakoso

* Pengajuan Judul Tesis harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Tesis
3. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 2 (IPK Minimal 3,00)
4. F/C Sertifikat Seminar MH



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1 Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2 Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2 Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fn.narotama.ac.id Email: dekan.fn@narotama.ac.id

SURAT PENUGASAN
No.340/NR.FH/03/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM/Prodi	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Dr. SUWARDI S.H., M.Hum.	12124059/ Magister Hukum	Dwi Hantoro Prakoso	DISKURSUS KEADILAN HUKUM PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM): STUDI NORMATIF ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 55 TAHUN 2022

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



26 Maret 2025

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. SUWARDI, S.H., M.H.

Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : DWI HANTORO PRAKOSO

No. Induk Mahasiswa : 12124059

Judul : **KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGOLONGAN
UMKM : ANALISIS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
(PP) NO. 7 TAHUN 2021 DAN PERATURAN
PRO PATRIA
PEMERINTAH (PP) NO. 55 TAHUN 2022 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PAJAK DAN HUKUM BISNIS**

Surabaya, 15 Februari 2025

Calon Pembimbing,

Dr. SUWARDI, S.H., M.H.

*) Pengajuan calon pembimbing dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kaprodi mengenai nama calon pembimbing.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya, Telp.(031)-5946404, 5995578

FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS*

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan oleh mahasiswa serta setelah melalui proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

1. Persyaratan penulisan tesis;
2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;
3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan
4. Originalitas judul tesis;

Maka Dewan Tesis menyetujui/tidak menyetujui *) judul dan calon pembimbing tesis sebagai berikut:

- I. Nama Mahasiswa : Dwi Hantoro Prakoso
Nomor Induk Mahasiswa : 12124059
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Kepastian Hukum Dalam Penggolongan UMKM : Analisis Atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Pajak dan Hukum Bisnis

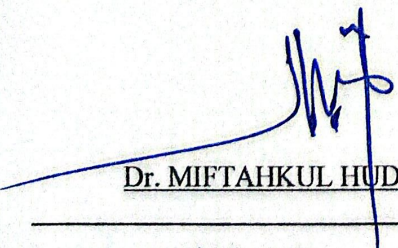
- II. Nama Pembimbing : Dr. Suwardi, S.H., M.H.

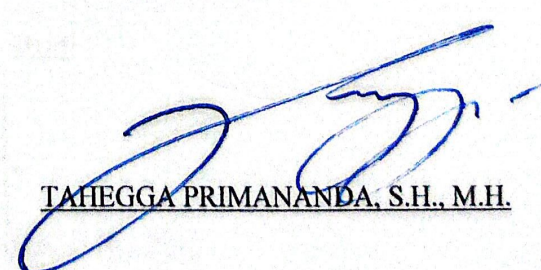
Disetujui oleh Dewan Tesis,

Di Surabaya Pada Tanggal 15 Februari 2025

Ketua

Sekretaris


Dr. MIFTAHKUL HUDA, S.H., M.H.


TAHEGGA PRIMANANDA, S.H., M.H.

* coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Dwi Hantoro Prakoso
No. Induk : 12124059
Alamat : Istana Bandara VII Blok L6-L7, Kel. Saptorenggo, Kec. Pakis,
Kab. Malang
Telp/HP : 085645462621
Pembimbing : Dr. Suwardi, S.H., M.H.
Judul Tesis : Kepastian Hukum Dalam Penggolongan UMKM : Analisis Atas
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum
Pajak dan Hukum Bisnis
Tgl Dimulai : 18 Februari 2025 PRO PATRIA

Surabaya, 15 Februari 2025
Mahasiswa

Pembimbing

Dr. Suwardi, S.H., M.H.

Dwi Hantoro Prakoso

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Miftahkul Huda, S.H., M.H



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PENYUSUNAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : DWI HANTORO PRAKOSO
NIM : 12124059
Judul Tesis : KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGOLONGAN UMKM : ANALISIS
ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7 TAHUN 2021 DAN
PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 55 TAHUN 2022 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PAJAK DAN HUKUM BISNIS

No.	Tanggal	Topik Bimbingan	Paraf DPA
1	18/2/2025	PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH	
2	27/2/2025	PEMBAHASAN PERUBAHAN JUDUL DAN RUMUSAN MASALAH	
3	7/3/2025	PEMBAHASAN KEPANGKA BAB 1	
4	17/3/2025	PEMBAHASAN LATAR BELAKANG, TINJAUAN PUSTAKA & DAFUS	
5	8/4/2025	REVISI BAB 1 PENAMBAHAN TINJAUAN PUSTAKA	
6	9/5/2025	REVISI BAB 1 KEDUA ORGINALITAS DARI PROPOSAL TESIS	
7	27/5/2025	ACC MAJU BAB SEMINAR PROPOSAL TESIS	
8			
9		PRO PATRIA	
10			
11			
12			
13			
14			

Dosen Penasehat Akademik

Dr. Suwardi, S.H., M.H.

Menyetujui
Ketua Program Studi

Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL*

Nama Mahasiswa : DWI HANTORO PRAKOSO

No. Induk Mahasiswa : 12124059

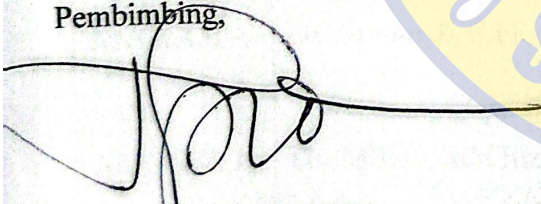
Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum / 2024

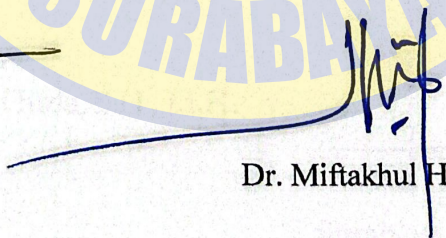
Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL TESIS pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGOLONGAN UMKM : ANALISIS ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 55 TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK DAN HUKUM BISNIS

Menyetujui Untuk Diuji
Pembimbing,

Surabaya, 5 Juni 2025
Kaprodi,


Dr. Suwardi, S.H., M.H


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

* Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangkap (Sampul warna merah)
3. Copy kwitansi pembayaran Tesis



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS

NAMA : DWI HANTORO PRAKOSO
NIM : 12124059
Tanggal Penilaian : 5 Juni 2025
Judul Tesis : KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGOLONGAN UMKM :
ANALISIS ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7 TAHUN
2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 55 TAHUN 2022
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK DAN HUKUM BISNIS
Pembimbing : Dr. SUWARDI, S.H., M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Nynda Fatmawati O, S.H., M.H	
ANGGOTA	Dr. Suwardi, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.	

Surabaya, 5 Juni 2025
Pembimbing,

Dr. Suwardi, S.H., M.H.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Hantoro Prakoso

No. Induk : 12124059

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1	LEBA MAX NARINDKO RINI	RESTORATIVE JUSTICE THD TINDAK PIDAWA ANAK DI PENANGKILAN NEGARA SIDHARJO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGARA SIDHARJO NO. 14/19803-A-14/L/2015)	5/6/2015	
2	EKO PURWANTO	KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENAKSIKAN PENYALINGGUNAAN NARKOBA	5/6/2015	
3	INGRID ANGELINA LUKYU RAF	RATIO DECIDENDI HAKIM MK TERHADAP PENENTUAN KRITERIA KATEGORI KECEKILAN	5/6/2015	
4	DWI HANTORO PRAKOSO	KEPASTIAN HUKUM PENEGULANGAN PENGEJARA DALAM PERSPEKTIF HUKUMPAJING DAN HUKUM BISNIS	5/6/2015	
5	MISSLENI	PERALIHAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM E-TILANG	5/6/2015	
6	WAHYU TRI HARTANTO	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI YANG DI AKSES DARA LUAR USULAYAH INDONESIA	5/6/2015	



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

7	MASRUFA	TANGGUNG JAWAB HUKUM PENILAIAN KUT DALAM BERDAGANG EXPORT-IMPORT BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL	5/6/2015	
---	---------	--	----------	--

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Surabaya, 5 Juni 2025
Mahasiswa

Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

Dwi Hantoro Prakoso





UNIVERSITAS *Narotama*

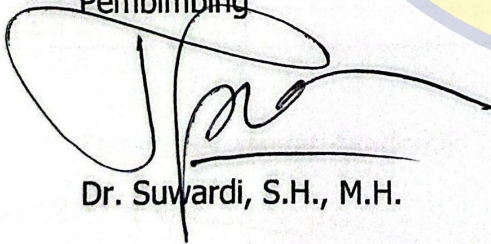
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN TESIS

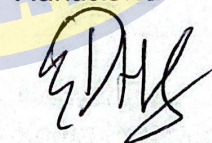
Nama Mahasiswa : Dwi Hantoro Prakoso
No. Induk : 12124059
Alamat : Istana Bandara VII Blok L6-L7, Kel. Saptorenggo, Kec. Pakis,
Kab. Malang
Telp/HP : 085645462621
Pembimbing : Dr. Suwardi, S.H., M.H.
Judul Tesis : Kepastian Hukum Dalam Penggolongan UMKM : Analisis Atas
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum
Pajak dan Hukum Bisnis
Tgl Dimulai : 18 Februari 2025

Pembimbing



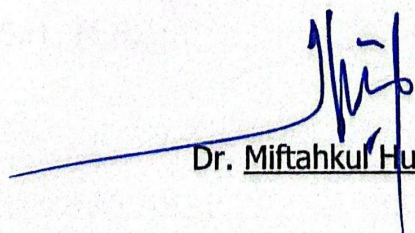
Dr. Suwardi, S.H., M.H.

Surabaya, 18 Februari 2025
Mahasiswa



Dwi Hantoro Prakoso

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Miftahkul Huda, S.H., M.H



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : DWI HANTORO PRAKOSO
NIM : 12124059
Judul Tesis : KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGOLONGAN UMKM :
ANALISIS ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7 TAHUN
2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 55 TAHUN 2022
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK DAN HUKUM BISNIS

No.	Tanggal	Topik Bimbingan	Paraf DPA
1	7/6/2025	PENAMBAHAN REVISI AFTER SEMPRO TESIS	
2	10/6/2025	PENAMBAHAN BAB II DAN KEPASTIAN PENGERTIAN	
3	26/6/2025	REVISI PENAMBAHAN BAB II	
4	30/6/2025	PENAMBAHAN PENAMBAHAN BAB II	
5	8/7/2025	REVISI BAB III DAN REVISI PEMULUTAN TESIS	
6	15/7/2025	REVISI BAB III DAN PENAMBAHAN SIMPULAN & SARAN	
7	16/7/2025	PENAMBAHAN KESELURUHAN DAN PEMULUTAN ABSTRAK	
8	21/7/2025	ACC MASUK SEMINAR TESIS	
9		PRO PATRIA	
10			
11			
12			
13			
14			

Dosen Penasehat Akademik

Menyetujui
Ketua Program Studi

Dr. Suwardi, S.H., M.H.

Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS*

Nama Mahasiswa : DWI HANTORO PRAKOSO

No. Induk Mahasiswa : 12124059

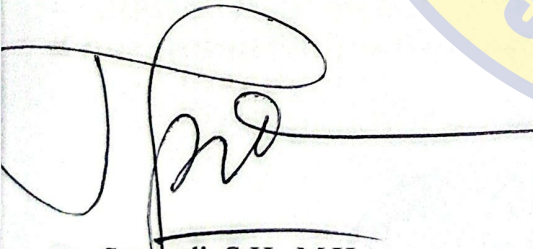
Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum / 2024

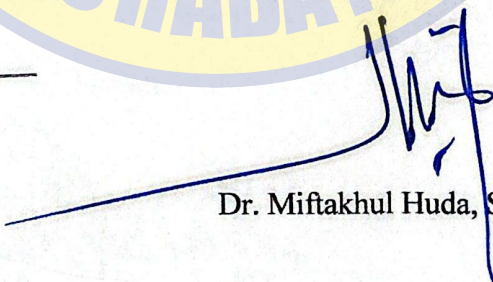
Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGOLONGAN UMKM : ANALISIS ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 55 TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK DAN HUKUM BISNIS

Menyetujui Untuk Diuji
Pembimbing,

Surabaya, 28 Juli 2025
Kaprodi,


Dr. Suwardi, S.H., M.H


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

* Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangkap (Sampul warna merah)
3. Copy kwitansi pembayaran Tesis



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :DWI HANTORO PRAKOSO
2. NIM :12124059
- Judul Skripsi /Tesis :DISKURSUS KEADILAN HUKUM PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM): STUDI NORMATIF ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 55 TAHUN 2022

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 16 Juli 2025

Mengetahui

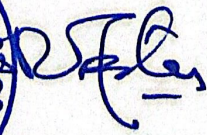
PRO PATRIA


Dr Miftakhul Huda, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Dr. Tahegga Primananda A ,S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,




Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS

NAMA : DWI HANTORO PRAKOSO
N I M : 12124059
Tanggal Penilaian : 28 Juli 2025
Judul Tesis : KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGOLONGAN UMKM :
ANALISIS ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7 TAHUN
2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 55 TAHUN 2022
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK DAN HUKUM BISNIS
Pembimbing : Dr. SUWARDI, S.H., M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Nynda Fatmawati O, S.H., M.H	
ANGGOTA	Dr. Suwardi, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.	

Surabaya, 29 Juli 2025
Pembimbing,

Dr. Suwardi, S.H., M.H.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



DWI HANTORO PRAKOSO

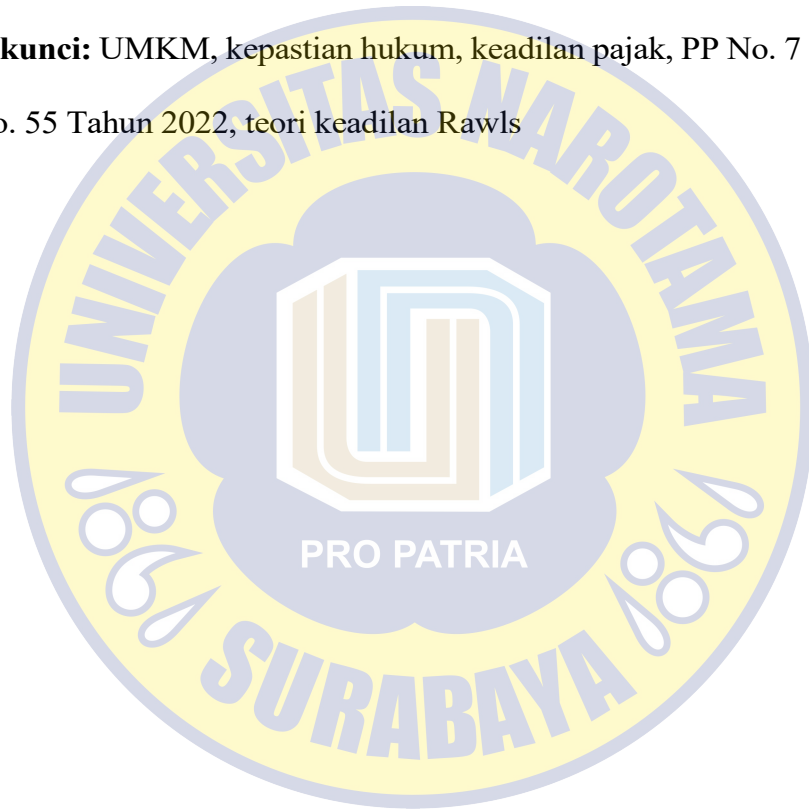
NIM : 12124059

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namun menghadapi tantangan dalam aspek perpajakan, terutama terkait ketidaksesuaian klasifikasi usaha dan kebijakan insentif fiskal. Perbedaan batasan omzet antara ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 dan PP No. 55 Tahun 2022 menimbulkan kerancuan hukum dan ketimpangan perlakuan pajak terhadap pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koherensi kedua regulasi tersebut terhadap asas kepastian hukum dan keadilan, serta merumuskan konsep ideal sistem perpajakan bagi UMKM yang lebih adil dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koherensi antara Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 dan Pasal 57 PP No. 55 Tahun 2022 dalam kaitannya dengan asas kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam konteks perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fokus utama terletak pada ketidaksesuaian klasifikasi usaha antara kebijakan insentif fiskal dan regulasi usaha, serta dampaknya terhadap keadilan fiskal dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, serta teori keadilan, khususnya pemikiran John Rawls. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara dua peraturan tersebut, yang berpotensi melemahkan efektivitas hukum dan menciptakan ketidakpastian dalam sistem perpajakan. Penelitian ini mengusulkan konsep ideal perpajakan UMKM berbasis prinsip keadilan substantif, dengan struktur tarif yang mempertimbangkan margin

usaha, penyederhanaan administrasi, dan harmonisasi regulasi. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan konsep ideal perpajakan UMKM yang mencakup reformulasi tarif pajak berdasarkan margin usaha, integrasi sistem legalitas dan perpajakan, serta penyederhanaan prosedur administrasi. Harmonisasi antar-regulasi dan koordinasi kelembagaan juga disoroti sebagai langkah penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: UMKM, kepastian hukum, keadilan pajak, PP No. 7 Tahun 2021, PP No. 55 Tahun 2022, teori keadilan Rawls



ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) play a strategic role in Indonesia's economy but face significant challenges in taxation, particularly regarding inconsistencies in business classification and fiscal incentive policies. The differing turnover thresholds set out in Government Regulation (GR) No. 7 of 2021 and (GR) No. 55 of 2022 have created legal ambiguity and unequal tax treatment for MSME actors. This study aims to analyze the coherence between Article 35 of GR No. 7 of 2021 and Article 57 of GR No. 55 of 2022 in relation to the principles of legal certainty and justice within the MSME taxation framework. The main focus is on the misalignment between fiscal incentive schemes and business classifications, as well as their implications for tax fairness and legal protection for UMKM. This research uses a normative juridical method, analyzing positive legal norms, legal principles, and theories of justice, particularly John Rawls's concept of *justice as fairness*. The findings indicate a lack of harmonization between the two regulations, which weakens legal effectiveness and generates uncertainty in the taxation system. The study proposes an ideal taxation model for UMKM based on substantive justice, including a tax rate structure that considers profit margins, simplified administrative procedures, and regulatory harmonization. Additionally, regulatory alignment and institutional coordination are emphasized as crucial steps toward establishing an inclusive, fair, and sustainable tax system for UMKM.

Keywords: UMKM, legal certainty, tax justice, GR No. 7/2021, GR No. 55/2022, Rawls's theory of justice

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya.

Penyusunan tesis ini tidak hanya merupakan bentuk pemenuhan kewajiban akademik, tetapi juga wujud tanggung jawab intelektual penulis sebagai bagian dari komunitas ilmiah untuk turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Penulis menyadari bahwa proses penulisan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian tesis ini merupakan hasil dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, yang dengan tulus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM, selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya.

4. Bapak Dr. Suwardi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, petunjuk, serta bimbingan secara intensif selama proses penyusunan tesis ini.
5. Para Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan selama masa studi.
6. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tjarmadi dan Ibu Yuni Sumarni, atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak ternilai.
8. Kepada kekasih yang senantiasa memberikan semangat, pengertian, serta dukungan moril dan spiritual dalam menyelesaikan proses penulisan ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan di almamater yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan keilmuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 31 Juli 2025

Dwi Hantoro Prakoso
NIM: 12124059

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	ii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji.....	iii
Surat Pernyataan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.6 Orisinalitas Penelitian.....	22
1.7 Metode Penelitian	31
1.8 Sistematika Penulisan	36
 BAB II ANALISIS KEDUDUKAN PASAL 35 PERATURAN PEMERINTAH	
 NO.7 TAHUN 2021 DAN PASAL 57 PERATURAN PEMERINTAH	
 NO. 55 TAHUN 2022 KOHERAN DENGAN ASAS KEPASTIAN	
 HUKUM DAN Keadilan	39
2.1 Analisis Kedudukan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021	

dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Koheren dengan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan.....	39
2.2 Asas Kepastian Hukum dan Implikasinya terhadap Regulasi Perpajakan	42
2.3 Asas Keadilan dalam Perspektif Teori John Rawls dan Aplikasinya terhadap UMKM	44
2.4 Koherensi dan Singkronisasi Antar-Regulasi Perpajakan UMKM.....	46
2.5 Analisis Potensi Ketidaksesuaian antara Norma dan Implementasinya	47
2.6 Implikasi Hukum atas Ketidakkoherenan dan Ketidakasilan	49
2.7 Analisis Kedudukan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 Koheren dengan Asas Kepastian dan Keadilan.....	49

BAB III RUMUSAN KONSEP IDEAL PERPAJAKAN UNTUK UMKM YANG MEMENUHI PRINSIP KEADILAN..... 52

3.1 Penerapan Prinsip Keadilan Substantif Dalam Desain Tarif Pajak UMKM.....	52
3.2 Reformulasi Sistem Perpajakan Berbasis Sektor dan Margin Usaha	54
3.3 Integrasi Sistem Legalitas dan Perpajakan	59
3.4 Penyederhanaan Prosedur dan Pendampingan Administratif.....	63
3.5 Harmonisasi Regulasi dan Koordinasi Kelembagaan.....	67

3.6	Membangun Ekosistem Perpajakan UMKM yang Responsif dan Inklusif.....	70
BAB IV PENUTUP		73
3.7	Simpulan	73
3.8	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....		77

